

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG*Tourism Development Strategy In Tulungagung Regency***Ida Gemawati Monda¹ & Imam Fachruddin²**^{1,2}Magister Ilmu Administrasi Universitas Kadiri**Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam pengembangan pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan interpretasi pengalaman para informan yang terkait dengan kegiatan pengembangan pariwisata. Setidaknya, strategi yang telah digunakan adalah melakukan sinergi seluruh lembaga terkait beserta optimalisasi peran desa wisata. Faktor penghambat yang muncul adalah lokasi geografis tempat wisata yang sulit dan merupakan daerah rawan bencana, sedangkan faktor pendukung yang signifikan adalah adanya media sosial yang mampu mendatangkan wisatawan tanpa memerlukan sumber daya yang besar..

Kata Kunci: strategi; pengembangan pariwisata; desa wisata; lokasi wisata

Abstract

This study aims to analyze the strategies that have been implemented by the local government of Tulungagung District in developing tourism. This study uses a qualitative approach to interpret the experiences of informants related to tourism development activities. At least, the strategy that has been used is to synergize all related institutions and optimize the role of tourism villages. The inhibiting factor that emerges is the geographical location of tourist attractions that are difficult and are disaster-prone areas, while a significant supporting factor is the presence of social media that can bring tourists without requiring substantial resources

Keywords: strategy; tourism development; tourist village; tourist location

A. PENDAHULUAN

Komitmen serta keseriusan pemerintah pusat dan daerah semakin menguat guna mendayagunakan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan sekaligus penguatan karakter lokal. Perkembangan sektor pariwisata ini diharapkan bermuara pada kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan dikembangkannya sektor pariwisata daerah, masyarakat sekitar dapat memperoleh sumber penghasilan tetap yang dapat dijadikan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Mereka dapat bekerja sebagai pedagang (makanan, souvenir, dan lain-lain), penyedia jasa parkir, penyedia jasa pendamping wisata (*guide*), atau bekerja di bidang lain.

Dari perspektif pembangunan, tidak dipungkiri jika pariwisata dipandang sebagai sektor penting sebagai sumber ekonomi negara serta masyarakat. Pariwisata

juga memiliki kemampuan mendorong pengembangan sosial budaya sekaligus strategis untuk mempromosikan citra bangsa diluar negeri. Hal ini lebih dikarenakan bahwa dengan dibuka dan dikembangkannya sektor wisata, daerah bisa memperkenalkan budaya mereka sekaligus melestarikan budaya asli daerah yang pada era modern ini semakin terkikis oleh budaya asing, serta mempromosikan produk unggulan daerah dengan mengaktifkan UMKM dan membangkitkan industri rumah tangga, sehingga diharapkan kelak dapat mengembangkan sumber penghasilan masyarakat, mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja.

Di era otonomi (desentralisasi) pemerintah kabupaten/kota diharapkan semakin mandiri, karena mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang ada, serta dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat bukan hanya

dalam pembiayaan tetapi juga terkait dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah adalah dengan melakukan penyusunan regulasi melalui *master plan* sesuai amanat UU No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yaitu sebagaimana tertera pada pasal 8, bahwa penting bagi Provinsi, Kabupaten/Kota menerbitkan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA). Adapun tujuan dan fungsi dari penyusunan dan penerbitan dokumen RIPPARDA ini untuk memberikan arah pengembangan atas visi misi serta rencana program pembangunan kepariwisataan pada masing-masing wilayah yang tentunya disinkronkan dengan dokumen perencanaan lainnya misalkan RPJMD, RTRW maupun RDTR.

Payung hukum pengembangan sektor pariwisata nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang - Undang ini memberikan batasan definisi pariwisata dan kepariwisataan sebagai berikut : "pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sementara itu yang dimaksud dengan kepariwisataan didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Definisi tersebut memberikan gambaran bahwa pembangunan sektor pariwisata perlu dilakukan secara terintegrasi dengan sektor lainnya dan dengan para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha maupun masyarakat. Secara khusus Undang - Undang ini juga telah mengatur dimensi pembangunan kepariwisataan nasional yang terbagi ke dalam empat bagian utama yaitu

(a) industri pariwisata, (b) destinasi pariwisata, (c) pemasaran, dan (d) kelembagaan kepariwisataan.

Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki kekayaan akan tempat wisata maupun aktivitas wisatanya yang sebelumnya terkenal dengan sebutan Kota Marmer, dalam mendorong pembangunan ekonominya mencoba untuk lebih berusaha mengembangkan potensi kewilayahan yang dimiliki. Kabupaten Tulungagung memiliki suguhan pemandangan alam yang indah, dengan memiliki bentang garis pantai sepanjang lebih kurang 51 km, terbentang sebanyak lebih dari 40 pantai yang eksotik, diantaranya Pantai Popoh, Pantai Sidem, Pantai Brumbun, Pantai Sine, Pantai Molang, Pantai Klatak, Pantai Gerangan, Pantai Mbayem, pantai Sioro, Pantai Brumbun, Pantai Sanggar, Pantai Ngalur, Pantai Pathok Gebang, Pantai Banyu Muluk, Pantai Nglarap dan lain-lain. Selain daya tarik wisata (DTW) pantai, Tulungagung juga memiliki DTW alam lain, diantaranya Air Terjun Lawean di Kecamatan Sendang, Coban Kromo di Kecamatan Campurdarat dan beberapa gua alami di wilayah perbukitan karst Campurdarat. Selain itu, di Kabupaten Tulungagung banyak pula dijumpai wisata minat khusus dan wisata sejarah maupun pra sejarah. Sebab di Kabupaten Tulungagung pernah ditemukan fosil manusia erectus (manusia purba) homo wajakensis. Peninggalan benda cagar budaya berupa candi, petilasan, makam kuno, juga banyak di jumpai di Kabupaten ini.

Di Kabupaten Tulungagung masih banyak DTW potensial yang belum dikembangkan dan dikelola dengan optimal oleh pemerintah. Kedepan, pengembangan sektor pariwisata ini diharapkan mampu mengembangkan perekonomian. Selain itu juga beberapa potensi wisata lain, khususnya wisata budaya, wisata alam, bahkan wisata kuliner yang dapat dijadikan sebagai destinasi alternatif selama berwisata di Provinsi Jawa Timur. Potensi-potensi wisata tersebut diharapkan mampu berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian wilayahnya. Lebih lanjut dipahami pula bila pariwisata dipandang sebagai industri yang

berdampak terhadap banyak sektor (*multiplier effects*), mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat serta menciptakan kesempatan kerja yang relatif besar sekaligus mengurangi kemiskinan. Menyadari akan keberadaan sumber daya pariwisata serta komponen lainnya, pemerintah Kabupaten Tulungagung di tahun 2015 menetapkan untuk melakukan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) agar lebih mampu mengembangkan dan melakukan tata kelola (manajemen) kepariwisataan daerah. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) ini merupakan strategi dasar dalam menentukan bagaimana pemerintah daerah Tulungagung akan memulai upaya pengembangan pariwisatanya guna mencapai tujuan pengembangan wisata sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Dalam penyusunan penelitian ini, yang menjadi focus penelitian yaitu: berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung yang merupakan dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Tulungagung, untuk mengembangkan destinasi/ obyek daya tarik wisata Kabupaten Tulungagung, beberapa obyek daya tarik wisata yang saat ini berkembang dan yang belum berkembang di Kabupaten Tulungagung, model dan teknik promosi wisata yang bisa diterapkan guna memperkenalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung, dan model pembinaan ekonomi kreatif dalam rangka untuk mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan latar belakang dalam Tesis ini, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung ?
2. Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung ?

B. KERANGKA TEORI

Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik lebih sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah, hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Carl J. Friedrich dalam Solichin (2004:3) yang menyatakan bahwa kebijakan ialah : "Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan." Pengertian kebijakan yang disebutkan di atas sebagai suatu tindakan yang diusulkan oleh pemerintah, lain halnya pendapat George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Islamy (2001:18-19) yang menyatakan bahwa "Kebijakan Negara adalah suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah", sehingga suatu kebijakan tidak hanya suatu tindakan yang diusulkan tetapi juga yang tidak dilaksanakan, demikian pula pendapat Thomas Dye dalam Subarsono (2005:2) yang mengatakan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Dengan pengertian-pengertian kebijakan publik di atas disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bersifat mengatur dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi, hal ini sejalan dengan pendapat Easton (Islamy, 2001:19) bahwa kebijakan mengandung nilai paksaan yang secara sah dapat dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu analisis dengan lebih melakukan retropeksi dari pada prospeksi dengan tujuan ganda, yaitu : pertama memberi informasi bagaimana program-program tersebut dapat terlaksana, kedua menunjukkan faktor-faktor yang dapat diubah agar diperoleh capaian hasil yang lebih baik yang

dapat memberikan perubahan implementasi atau program baru. Sebagaimana Budi Winarno (1998:72) menyatakan proses implementasi memiliki variabel atau faktor yang membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan capaian (performance). Variabel tersebut merupakan variabel bebas dan variabel terikat yang saling berhubungan satu sama lainnya. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa capaian kebijakan dipengaruhi adanya beberapa variabel, variabel-variabel tersebut ditunjukkan pada beberapa model Implementasi kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn (Samudra Wibawa,1994:19) Implementasi kebijakan dipengaruhi adanya komunikasi, sumber-sumber (sumber daya), kecenderungan/sikap dan struktur birokrasi, standard dan sasaran kebijakan serta kondisi sosial ekonomi dan politik. Spesifik Van Meter dan Van Horn lebih menekankan kepada kinerja kebijakan.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (Solichin 2004:81) dalam model implementasi kebijakannya juga menganggap faktor komunikasi akan berpengaruh yaitu komunikasi antar organisasi terkait serta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antar hubungan dalam lingkungan sistem politik dengan kelompok-kelompok sasaran. Van Meter mengharapkan semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggung jawab mereka, organisasi atasan mestinya mampu mengkondisikan organisasi bawahan atau pelaksana, karena dalam implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama bagi keberhasilan suatu program.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana Untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Van Meter dan Van Horn juga megemukakan bahwa kapasitas sebagai faktor yang berpengaruh bagi implementasi kebijakan (Budi Winarno, 2002 : 122).

E-Government

E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna pelaksanaan pemerintahan yang efisien dan murah, meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cara menyediakan sarana publik sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi (Caldow, disitasi Indrajit, 2006). Pendapat lain mengatakan bahwa e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti : Wide Area Network, Internet dan mobile computing) yang memungkinkan pemerintah

untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. Dalam prakteknya, e-Government adalah penggunaan internet untuk melakukan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (<http://www.worldbank.org>, disitasi Indrajit, 2006).

Beberapa definisi lain mengenai e-Government menurut beberapa sumber sebagai berikut :

- 1) Deloitte Research (2000) : menggunakan teknologi untuk pelayanan masyarakat, bisnis dan pegawai yang lebih baik.
- 2) West (2001, p.863) : pengiriman informasi pemerintahan dan layanan online melalui internet atau perlengkapan digital lainnya.
- 3) Cook et.al (2002) : e-Government memiliki empat dimensi dalam hubungannya dengan fungsi dan kegiatan pemerintahan: e-services (mengirim informasi secara elektronik/online), management (menggunakan TIK untuk meningkatkan manajemen dan komunikasi di internal atau di luar struktur pemerintahan), e-democracy (menggunakan TIK untuk mendapatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi), dan e-commerce (transaksi online dari kebutuhan dan layanan).
- 4) Bhatnagar (2002): membagi dan melayani masyarakat dan bisnis dengan tujuan mengurangi korupsi, mengurangi waktu dan biaya, dan meningkatkan transparansi.
- 5) World Bank (2002): menggunakan TIK untuk mengubah dan meningkatkan hubungan antar pemerintah, masyarakatbisnis dan unit pemerintahan lainnya.
- 6) Mark Forman (2005): penerapan TIK untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional.
- 7) World Bank Group (2006): penggunaan TI oleh badan-badan pemerintah, seperti: wide area network, internet dan mobile computing yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan badan pemerintah lainnya.
- 8) Legislative Analyst's office (2006): sebuah proses transaksi bisnis antara masyarakat dan pemerintah melalui penggunaan sistem yang terotomasi dan jaringan internet, biasanya disebut world wide web.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Menurut Dr. Nag Yeon

Lee terdapat 8 (delapan) model e-Government, yaitu:

- 1) Pemerintah ke masyarakat (G2C): penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat.
- 2) Masyarakat ke pemerintah (C2G): memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
- 3) Pemerintah ke bisnis (G2B): transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Sebagai contoh yaitu sistem e-procurement.
- 4) Bisnis ke pemerintah (B2G): mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien, terjadi peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Sistem e-procurement adalah contoh aplikasi yang memfasilitasi baik interaksi G2B maupun B2G.
- 5) Pemerintah ke pegawai (G2E): terdiri dari inisiatif-inisiatif yang memfasilitasi manajemen pelayanan dan komunikasi internal dengan pegawai pemerintahan.
- 6) Pemerintah ke pemerintah (G2G): memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi sehingga berdampak pada efisiensi dan efektivitas.
- 7) Pemerintah ke ke organisasi nirlaba (G2N): pemerintah menyediakan informasi bagi organisasi nirlaba, partai politik, atau organisasi sosial.
- 8) Organisasi nirlaba ke pemerintah (N2G): memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi nirlaba, partai politik dan organisasi sosial.

Menurut Lee (2009) tujuan dari e-Government adalah penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. Umumnya semakin banyak layanan online yang tersedia dan semakin luas penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar dampaknya terhadap e-Government. Kemudian menurut Raharjo (2001) manfaat dari penerapan e-Government adalah :

- 1) Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintah.
- 2) Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih

baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya.
- 4) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang sangat luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu.

Menurut Inpres No. 3 Tahun 2003, pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan, yaitu (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

C. METODE PENELITIAN

Perspektif Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis, dimana peneliti akan menggambarkan masalah strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Tulungagung secara rinci dengan menggunakan data-data yang diperoleh selama proses penelitian.

Penelitian dilakukan dengan melakukan studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu yang kemudian didukung oleh bahan-bahan dari hasil kepustakaan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Kabupaten Tulungagung, secara spesifik pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Lokasi ini kami pilih karena Kabupaten Tulungagung memiliki banyak daerah wisata yang sangat bagus dan menarik untuk dikembangkan. Potensi wisata lain yang tidak kalah menarik adalah wisata budaya, wisata kuliner, kerajinan dan lain-lain. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung

merupakan lembaga milik pemerintah yang memang secara khusus menangani masalah pariwisata di daerah Kabupaten Tulungagung, sehingga terkait strategi pengembangan pariwisata, Dinas tersebutlah yang paling tepat untuk peneliti peneliti jadikan tempat studi. Selain itu juga karena di Kabupaten Tulungagung sudah terdapat aturan khusus terkait pengembangan daerah wisata.

D. PEMBAHASAN

Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tulungagung

Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa pemerintah Kabupaten Tulungagung, khususnya instansi terkait, yaitu Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, telah membuat rencana pembangunan dan pengembangan pariwisata yang terdapat di Kabupaten Tulungagung, baik wisata alam, buatan, sejarah dan budaya, dan juga wisata kuliner. Kabupaten Tulungagung telah membuat strategi khusus dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata dengan menerbitkan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017. Dengan adanya perda ini pemerintah daerah mendapatkan landasan hukum dalam pembangunan dan pengembangan obyek daya tarik pariwisata yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Dalam pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Tulungagung yang sangat kompleks dan beraneka ragam ini, tentunya membutuhkan strategi yang cermat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa pejabat di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan pariwisata didapatkan berbagai informasi yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menganalisis strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung. Strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung tersebut antara lain :

1. Mensinergikan semua Perangkat Daerah dan stakeholder terkait untuk secara bersama - sama membangun dan mengembangkan obyek daya tarik wisata sesuai dengan prioritas
2. Pembangunan sarana dan prasarana akses jalan menuju kawasan obyek daya tarik pariwisata yang akan dikembangkan

3. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana umum pada destinasi wisata yang sudah di kerjasamakan antara Pemerintah Daerah, Perhutani dan Pemerintah Desa.

4. Menggandeng investor dalam pengembangan pariwisata, dengan MOU yang jelas. Hal ini dilakukan dalam rangka mensiasati adanya keterbatasan anggaran.

5. Mengoptimalkan peran dan fungsi desa dan pokdarwis dalam pengembangan obyek daya tarik pariwisata yang ada di daerahnya masing - masing. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan dana desa untuk membangun obyek wisata yang ada di daerahnya yang selanjutnya dapat dikelola oleh Bumdes.

6. Menggunakan berbagai media baik media online, media elektronik, media cetak, dan juga media lainnya untuk kegiatan promosi pariwisata.

7. Mengoptimalkan peran ekonomi kreatif dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tulungagung.

Untuk mengetahui apakah strategi yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung benar-benar sesuai untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Tulungagung, maka perlu diadakan suatu analisa khusus dengan mempertimbangkan banyak faktor yang memang bisa dijadikan acuan, seperti analisa mengenai isu-isu strategis terkait kepariwisataan, peran pariwisata dalam pembangunan, isu-isu kepariwisataan baik secara regional, nasional, maupun daerah, analisa mengenai destinasi wisata yang menjadi favorit pengunjung, analisis kerawanan bencana yang tentu akan sangat berpengaruh terhadap destinasi wisata dan jumlah wisatawan, analisis terkait prioritas destinasi wisata yang harus dibangun dan dikembangkan terlebih dahulu, analisis terkait ketersediaan fasilitas pendukung di wilayah destinasi wisata, dan lain-lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pembangunan dan pengembangan pariwisata.

Analisis Destinasi Wisata Dan Prioritasnya

Destinasi wisata di Kabupaten Tulungagung yang menjadi prioritas para wisatawan ditunjukkan dengan potensi daya tarik yang dimiliki oleh destinasi wisata yang dimaksud dan seberapa banyak wisatawan yang mengunjunginya. Untuk destinasi wisata yang memiliki potensi daya tarik yang bagus, baik itu

wisata alam, buatan, budaya dan kuliner, akan dibangun, dikembangkan dan dikelola dengan baik oleh instansi terkait.

Dari data sebaran kepariwisataan Kabupaten Tulungagung terlihat bahwa daya tarik wisata alam cukup bervariasi dan banyak dikunjungi wisatawan. Fakta ini menunjukkan bahwa wisata alam yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung memiliki kualitas yang bagus sehingga diminati wisatawan, dan promosinya cukup efektif melalui media sosial. Selain promosi dilakukan oleh dinas terkait, ternyata kebiasaan pengunjung yang kemudian memposting foto mereka saat melakukan kunjungan di destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung, juga sangat berperan dalam promosi destinasi wisata. Sebagian besar postingan memilih wisata alam, seperti pantai, sebagai destinasi wisata favorit yang memiliki keindahan pemandangan yang cukup menarik.

Analisis Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata

Dalam menentukan strategi pembangunan dan pengembangan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung telah menyusun rencana strategis yang dimuat dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA), dimana RIPPARDA itu sendiri merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk memulai upaya pengembangan pariwisata guna mencapai tujuan pengembangan wisata sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung sangatlah beragam, diantaranya adalah :

1. Membuat tema produk untuk Tulungagung sesuai dengan kluster, terbagi dalam tiga kluster, yaitu : 1) daerah pantai selatan Jawa yang didukung bentang pantai yang luas, 2) area tengah yang memiliki potensi sejarah dan budaya masyarakat, dan 3) daerah pegunungan argo wilis yang memiliki potensi alam pegunungan serta budaya.
2. Diseminasi citra pariwisata dalam informasi dan promosi pariwisata, dilaksanakan dengan penciptaan citra dan semboyan pariwisata. Dengan harapan destinasi pariwisata semakin dikenal dan mudah diingat oleh masyarakat.
3. Mengatur strategi pemasaran dengan mengidentifikasi sumber-sumber wisatawan yang

potensial, merancang materi dan media promosi yang informatif, efektif dan efisien.

4. Mengembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia, dimana dalam hal pengelolaan daya tarik wisata dilakukan oleh pemerintah, lembaga swasta, masyarakat, dan organisasi manajemen destinasi yang melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Langkah riil yang diterapkan dengan meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat, peningkatan pendidikan, ekonomi, perencanaan destinasi wisata dan pengembangan konservasi.

Pembangunan dan pengembangan pariwisata, secara riil juga sangat bergantung pada ketersediaan modal untuk mengelola, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan usaha pariwisata, selain tata kelola yang baik dan terencana.

Dalam hal pelaksanaan RIPPARDA, pemerintah Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini dinas terkait, sudah berupaya secara maksimal, terbukti dengan semakin dikenalnya daerah tujuan wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung, adanya peningkatan hasil industri pariwisata dari tahun ke tahun, serta pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung yang juga mengalami penambahan. Meskipun tetap saja terdapat kendala-kendala tertentu, terkait pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tulungagung.

Faktor Penghambat Dan Pendukung Pelaksanaan Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tulungagung

Dalam pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Tulungagung tidak terlepas dari adanya faktor penghambat dan faktor pendukungnya. Faktor-faktor ini perlu diurai agar ke depan dapat dijadikan referensi sebagai dasar penerapan ulang strategi yang sudah ada atau mengubah item-item tertentu yang ada dalam strategi lama, atau mungkin menggantinya dengan strategi baru yang lebih baik, efektif dan efisien. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

Faktor Penghambat

- 1) Dana yang terbatas
- 2) Lokasi geografis objek wisata.
- 3) Status kepemilikan lahan dengan pihak lain (Perum Perhutani).
- 4) Banyak daerah destinasi wisata yang rawan bencana, sehingga perlu kewaspadaan dan

kesiapan tersendiri dari dinas terkait atau pengelola untuk menyikapinya.

Faktor Pendukung

- 1) Objek wisata yang sudah terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas.
- 2) Peran pemerintah dan masyarakat sekitar.
- 3) Mudah nya koordinasi antar pihak terkait.
- 4) Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.
- 5) Diterbitkannya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 2 pada Tahun 2017 guna melaksanakan amanat UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
- 6) Perkembangan Teknologi.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung, baik wisata alam, buatan, budaya, maupun kuliner, dan wisata lainnya, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) yang memuat strategi pengembangan pariwisata guna melaksanakan tujuan pembangunan wisata sebagaimana diamatkan dalam UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Berbagai rencana pengembangan dituangkan dalam RIPPARDA dan sudah dilaksanakan oleh dinas terkait dengan melibatkan swasta dan masyarakat secara maksimal, dengan bukti semakin dikenalnya daerah wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung oleh masyarakat luas, semakin banyaknya pengunjung yang mendatangi obyek wisata di Kabupaten Tulungagung serta bertambahnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor wisata. Meskipun belum semua obyek wisata yang sebenarnya memiliki daya tarik wisata telah dibangun, dikelola dan dikembangkan dengan baik, karena keterbatasan dana yang tersedia. Sedangkan terkait dengan

strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tulungagung antara lain :

- a. Menyusun dokumen perencanaan pengembangan wilayah obyek daya tarik wisata yang menjadi prioritas untuk dikembangkan;
 - b. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait (perhutani dan desa) dalam mengembangkan obyek daya tarik wisata yang menjadi prioritas untuk dikembangkan;
 - c. Membangun obyek daya tarik wisata yang menjadi prioritas untuk dikembangkan melalui pendanaan APBD, APBD, Provinsi, maupun swasta;
 - d. Melibatkan masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata dalam pengembangan obyek daya tarik wisata;
 - e. Mengadakan event - event hiburan pada obyek daya tarik wisata;
 - f. Melakukan promosi wisata melalui berbagai media, baik media online, media cetak, media elektronik, serta mengikuti kegiatan pameran wisata di luar daerah;
 - g. Melibatkan masyarakat dalam mempromosikan pariwisata;
 - h. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola obyek daya tarik pariwisata dengan mengadakan pelatihan - pelatihan;
 - i. Menarik minat investor untuk menginvestasikan modalnya pada bidang kepariwisataan di Kabupaten Tulungagung. Dimana Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perijinan, pemenuhan sarana - prasarana yang dibutuhkan (akses jalan, listrik, dan lain - lain);
2. Dalam hal pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulungagung, terdapat berbagai faktor penghambat dan pendukung yang keberadaannya sangat penting karena memberi pengaruh yang signifikan dalam pengembangan pariwisata.
Adapun faktor penghambatnya adalah :
 - a. Ketersediaan dana yang terbatas
 - b. Lokasi geografis obyek wisata
 - c. Status kepemilikan lahan yang terkait dengan pihak lain (Perhutani)
 - d. Banyak destinasi wisata yang rawan bencanaAdapun faktor pendukungnya adalah :
 - a. Sebagian besar destinasi wisata di Kabupaten Tulungagung sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat luas
 - b. Adanya peran pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata.

c. Mudah nya koordinasi antar pihak terkait, dalam hal ini Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung dengan pengelola, dan pengelola tersebut bisa dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

d. Adanya UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata an.

e. Diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang RIPPARDA Kabupaten Tulungagung untuk mewujudkan cita-cita yang diamanatkan oleh UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata an.

f. Kemajuan teknologi yang menunjang promosi wisata secara cepat, mudah, efektif dan efisien.

E. REFERENSI

Buku

Farid Ali, 2008, Studi Tentang Kebijakan Publik, Universitas Padjadjaran, Bandung
 Glueck dan Jauch, 1989, Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan, Erlangga, Jakarta
 George R. Terry, 2003, Prinsip-prinsip Manajemen, Jakarta, Bina aksara
 Hadari Nawawi, 1993, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
 Hariadi, 2005, Strategi Manajemen, Bayumedia Publishing, Jakarta
 Horold Koontz dan Cyril O'donnel, 1986, Principle of management, California, alih bahasa oleh Malayu SP
 Howlet dan Ramesh, 2005, Prinsip-prinsip Kebijakan Publik, Jakarta, Bumi aksara
 James A.F. stoner, 1995, Manajemen, Edisi 6. New Jercy
 James J. Spillane, 1987, Ekonomi Pariwisata, Kanisius
 Lawrence A. Appley, 2010, Leadership on the job, Jakarta, erlangga
 Lexy J. Moleong, 1994, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya
 Medlik dalam ariyanto, 2005, Pelangi Pariwisata Bali (bunga rampai tulisan wisata), Bali
 Miles dan Hubberman, 1992, Analisa Data Kualitatif, Universitas Indonesia Pers, Jakarta
 Nyoman S. Pedit, 1994, Ilmu pariwisata, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
 Oey Liang Lee, 2010, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 6, Buku 1, Jakarta, Sakemba
 Oka A. Yoeti, 1997, Dasar-dasar Pariwisata, Andi. Yogyakarta
, 1985, Pengantar Ilmu Pariwisata, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta
 Pitana, 2005, Sosiologi Pariwisata, Cetakan 1, Bali

Plog, 1972, Sport Tourism, Buku online
 Salusu, 2000, Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik, Grafindo Persada, Surabaya

Suharsimi Arikunto, 1998, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,)

Sumadi Suryabrata, 1987, Metode Penelitian , Jakarta : Rajawali

Suwitri, 2008, Konsep Dasar Kebijakan Publik, Semarang, UNDIP

Tatang Amirin, 1990, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta, Rajawali

Wahab, 2008, Analisis Kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

William N. Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gadjahmada University Press

Tulungagung Dalam Angka 2016, BPS Kabupaten Tulungagung

Peraturan Perundangan

UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata an

Perpres Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan ASEAN Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata ASEAN)

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.

Peraturan Menbudpar Nomor KM-67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata Di Pulau-pulau Kecil.

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP - 012/MKP/IV/2001, 2-4-2001, tentang Pedoman Umum Usaha Pariwisata, mengatur perizinan usaha pariwisata bagi Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang RIPPARDA Kabupaten Tulungagung

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 - 2032

Internet

<http://hukum.unsrat.ac.id/wisata/wisata.htm>